



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Periode Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2023

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan SKPD merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi Keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan dalam hal ini adalah Pemerintah Kota Palangka Raya dan Entitas Akuntansi adalah SKPD Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Palangka Raya.

1.1.1. Maksud Penyusunan Laporan Keuangan

Selain sebagai bentuk akuntabilitas atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada BKPSDM Kota Palangka Raya penyusunan laporan keuangan ini dimaksudkan memberikan informasi yang bermanfaat bagi para penggunanya terutama dalam menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi atas penggunaan sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

1.1.2. Tujuan penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan ini disusun dengan tujuan untuk menyajikan informasi yang relevan mengenai posisi Keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh BKPSDM Kota Palangka Raya sebagai Entitas Akuntansi selama satu periode pelaporan dengan :

- a. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran.
- b. Menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan.
- c. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah serta hasil-hasil yang telah dicapai.
- d. Menyediakan informasi mengenai bagaimana pemerintah daerah mendanai seluruh kegiatan dan mencakup kebutuhan kasnya.
- e. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan dan kondisi pemerintah daerah berkaitan dengan sumber – sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman.

- f. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan pemerintah daerah, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.
- g. Untuk memenuhi tujuan – tujuan tersebut, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah menyediakan informasi mengenai sumber dan penggunaan sumber daya keuangan/ekonomi, transfer, pembiayaan, sisa lebih atau kurang pelaksanaan anggaran, saldo anggaran lebih, surplus/defisit Laporan Operasional, aset, kewajiban, ekuitas dan arus kas Pemerintah Daerah.

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2023 disusun berdasarkan dengan :

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- b. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 726, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
- e. Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);

- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- k. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2014 Nomor 4);
- l. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 2);
- m. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 21 Tahun 2019 tentang Pembentukan Hukum Daerah Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2019 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 5);
- n. Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 5 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2021 Nomor 5);
- o. Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 63 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Palangka Raya (Berita Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2021 Nomor 63);
- p. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 11 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2023 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 11);
- q. Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 48 Tahun 2023 tentang perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2023 Nomor 48).

1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan BKPSDM Kota Palangka Raya Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

- | | |
|---------|--|
| Bab I | Pendahuluan, berisikan maksud dan tujuan penyusunan laporan Keuangan, landasan hukum penyusunan laporan Keuangan, sistematika penulisan catatan atas laporan Keuangan, dan informasi tentang organisasi. |
| Bab II | Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan, berisikan ikhtisar pencapaian target kinerja Keuangan, hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan. |
| Bab III | Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan, berisikan Rincian dan penjelasan masing-masing pos-pos pelaporan Keuangan yang terdiri dari pendapatan, beban, belanja, Aset, kewajiban dan ekuitas. |
| Bab IV | Penjelasan atas informasi-informasi non Keuangan. |
| Bab V | Penutup, berisikan kesimpulan mengenai kinerja keuangan organisasi dan langkah-langkah dalam mengatasi hambatan pencapaian target kinerja keuangan |

1.4. Informasi Tentang Organisasi

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Palangka Raya dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya dengan organisasi Badan Tipe B melaksanakan fungsi penunjang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan. Berdasarkan Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 63 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Palangka Raya melaksanakan tugas dan fungsi sebagai berikut :

1. Tugas Pokok BKPSDM Kota Palangka Raya

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan fungsi penunjang bidang Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan yang menjadi kewenangan Daerah;

2. Fungsi BKPSDM Kota Palangka Raya

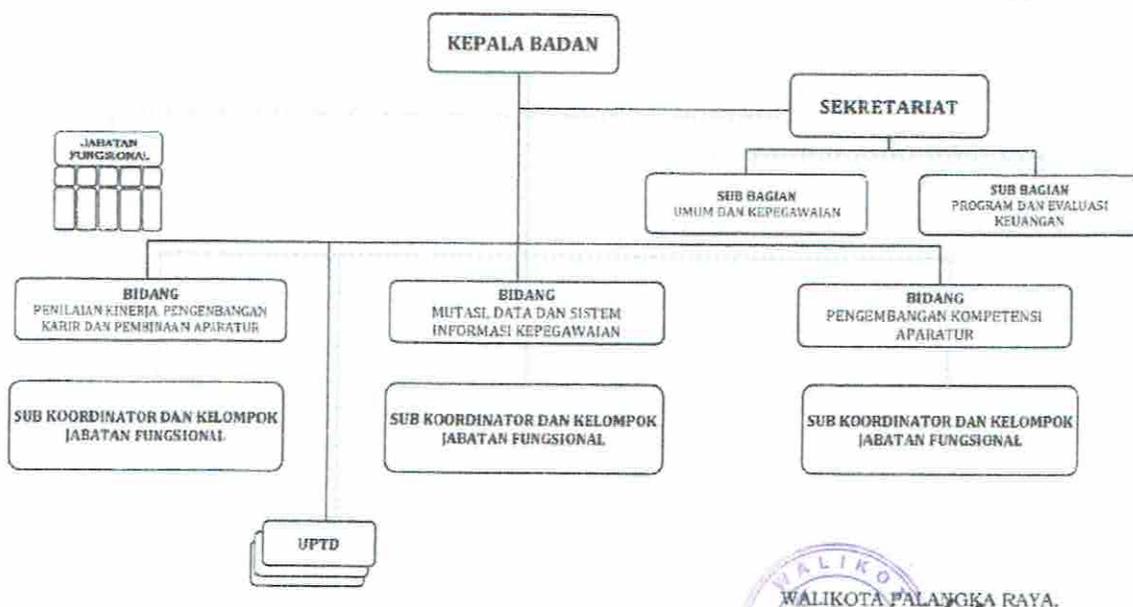
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan kebijakan teknis bidang penilaian kinerja, pengembangan karir, pembinaan aparatur, mutasi, data, informasi, dan pengembangan kompetensi aparatur;

- b. pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang penilaian kinerja, pengembangan karir, pembinaan aparatur, mutasi, data, informasi, dan pengembangan kompetensi aparatur;
- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan tugas dukungan teknis bidang penilaian kinerja, pengembangan karir, pembinaan aparatur, mutasi, data, informasi, dan pengembangan kompetensi aparatur;
- d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan Pemerintahan bidang kepegawaian, serta pendidikan dan pelatihan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Berikut adalah struktur organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Palangka Raya :

Gambar 1.1 Struktur Organisasi BKPSDM Kota Palangka Raya



Sumber : lampiran Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 63 Tahun 2021

Sebagaimana struktur organisasi di atas Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Palangka Raya Tahun 2023 didukung Sumber Daya Manusia sebanyak 54 (lima puluh empat) orang yang terdiri dari Aparatur Sipil Negara (ASN) sebanyak 42 (empat puluh dua) orang, 2 (dua) orang PPPK dan 10 (dua belas) orang Tenaga Kontrak yang dapat dirinci sebagai berikut :

a. Rekapitulasi ASN BKPSDM Kota Palangka Raya Berdasarkan Status Kepegawaian

Tabel 1.1. Rekapitulasi ASN BKPSDM Kota Palangka Raya Berdasarkan Status Kepegawaian

No	Status Kepegawaian	Jumlah (Orang)
1	Aparatur Sipil Negara (ASN)	42
2	PPPK	2
3	Tenaga Kontrak	10
Jumlah		54

Sumber : DUK BKPSDM Tahun 2023

b. Rekapitulasi ASN BKPSDM Kota Palangka Raya berdasarkan Golongan

Dari total 42 (empat puluh dua) orang PNS pada BKPSDM pada Tahun 2023 jumlah golongan III lebih banyak dari pada golongan IV dan Golongan II, terutama pada golongan (III/a) dan (III/d).

Tabel 1.2. Rekapitulasi ASN BKPSDM Kota Palangka Raya Berdasarkan golongan

No	Unit Kerja	Jmlh PNS	GOLONGAN															
			IV					III					II					
			A	B	C	D	E	JML	A	B	C	D	JML	A	B	C	D	JML
1	Kepala Badan	1	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0
2	Sekretariat	13	2	-	-	-	-	2	3	2	1	2	8	-	-	3	-	3
3	Bidang Mutasi Pegawai	12	1	-	-	-	-	1	3	3	2	3	11	-	-	-	-	-
4	Bidang Pengembangan Pegawai	9	-	-	-	-	-	-	5	-	1	3	9	-	-	-	-	-
5	Bidang Diklat	7	1	-	-	-	-	1	1	-	1	4	6	-	-	-	-	-
Total		42	4	-	1	-	-	5	12	5	5	12	34	-	-	3	-	3

Sumber : DUK BKPSDM Tahun 2023

c. Rekapitulasi ASN BKPSDM Kota Palangka Raya Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Pada Tahun 2023 jumlah PNS perempuan lebih banyak dari pada PNS laki-laki dan dari tingkat Pendidikan terendah yang terdapat pada BKPSDM yaitu SMU/SMK dengan jumlah 1 (satu) orang dan yang terbanyak adalah PNS dengan tingkat Pendidikan Strata-1 sebanyak 21 (dua puluh satu) orang.

Tabel 1.3. Rekapitulasi ASN BKPSDM Kota Palangka Raya Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Laki – Laki	Perempuan	Jumlah
1	S-2	7	6	13
2	S-1	10	11	21
3	D.III	-	7	7
4	SMU/SMK	1	-	1
	Jumlah	18	24	42

Sumber : DUK BKPSDM Tahun 2023

d. Rekapitulasi Pegawai BKPSDM Kota Palangka Raya Berdasarkan Tingkat Jabatan

Tabel 1.4. Rekapitulasi ASN BKPSDM Kota Palangka Raya Berdasarkan Tingkat jabatan

No	Jabatan	Laki – Laki	Perempuan	Total
1	Eselon II	1	0	1
2	Eselon III	2	2	4
3	Eselon IV	1	1	2
4	JFU	10	14	24
5	JFT	4	7	11
	Total	18	24	42

Sumber : DUK BKPSDM Tahun 2023

BAB II

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

2.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Per Jenis Belanja

Pembiayaan pelaksanaan Program dan Kegiatan BKPSDM Tahun Anggaran 2023 bersumber dari APBDP Kota Palangka Raya dengan Anggaran sebesar Rp. 11.708.538.100,- (*sebelas milyar tujuh ratus delapan juta lima ratus tiga puluh delapan ribu seratus rupiah*); Dan sampai dengan 31 Desember 2023 anggaran yang terserap adalah 93,26 % atau sebesar Rp. 10.919.433.000,- (*sepuluh milyar sembilan ratus sembilan belas juta empat ratus tiga puluh tiga ribu rupiah*); Berikut adalah realisasi fisik dan Keuangan BKPSDM Kota Palangka Raya TA. 2023

Tabel 2.1. Realisasi Fisik dan Keuangan BKPSDM TA. 2023

Uraian	Pagu	Realisasi		
		Fisik	Keuangan	
		%	Rp	%
BELANJA DAERAH	11.708.538.100	95,3 %	10.919.433.000	93,26 %
BELANJA OPERASI	10.973.289.300	92,88 %	10.192.360.680	92,88 %
- Belanja Pegawai	4.896.421.849	100,00 %	4.664.071.154	95,25 %
- Belanja Barang dan Jasa	6.076.867.415	90,97 %	5.528.289.526	90,97 %
BELANJA MODAL	735.248.800	98,89 %	727.072.320	98,89 %

Sumber : <https://www.bappedakotapalangkaraya.emonev7.com>

2.1.1 Pendapatan.

BKPSDM Kota Palangka Raya merupakan SKPD yang tidak memiliki anggaran untuk pendapatan dan/atau melakukan realisasi atas pendapatan asli daerah.

2.1.2. Belanja

2.1.2.1. Belanja Operasi

Belanja Operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk Kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek; Belanja Operasi yang terdapat pada BKPSDM Kota Palangka Raya TA. 2023 terdiri dari belanja pegawai dan belanja barang dan jasa.

Belanja pegawai merupakan belanja kompensasi diberikan kepada Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah, pimpinan / anggota DPRD, dan Pegawai ASN antara lain berupa gaji dan tunjangan, tambahan penghasilan Pegawai ASN, belanja penerimaan lainnya pimpinan dan anggota DPRD serta

Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah, insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, dan honorarium.

Belanja barang dan jasa merupakan digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dalam rangka melaksanakan Program dan Kegiatan Pemerintahan Daerah, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga.

Realisasi Belanja Operasi BKPSDM TA. 2023 sebesar Rp. 10.192.360.680,00 (*sepuluh milyar seratus sembilan puluh dua juta tiga ratus enam puluh ribu enam ratus delapan puluh rupiah*) atau sebesar 92,88 % dari jumlah pagu yang dianggarkan Rp. 10.973.289.300,00 (*sepuluh milyar sembilan ratus tujuh puluh tiga juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah*) dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.2. Realisasi Belanja Operasional BKPSDM TA. 2023

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)	%
1.	Belanja Pegawai	4.896.421.849,00	4.664.071.154,00	232.350.695,00	95,25
2.	Belanja Barang dan Jasa	6.076.867.451,00	5.528.289.526,00	548.577.925,00	90,97
	Jumlah	10.973.289.300,00	10.192.360.680,00	780.928.620,00	92,88

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran BKPSDM TA. 2023

1.1.2.2. Belanja Modal

Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi. Dan Realisasi Belanja Modal BKPSDM Kota Palangka Raya Per 31 Desember 2023 adalah Rp. 727.072.320,00 (*tujuh ratus dua puluh tujuh juta tujuh puluh dua ribu tiga ratus dua puluh rupiah*) atau sebesar 98,89 % dari jumlah pagu anggaran yang dianggarkan Rp. 735.248.800,00 (*tujuh ratus tiga puluh lima juta dua ratus empat puluh delapan ribu delapan ratus rupiah*) dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.3. Realisasi Belanja Modal BKPSDM TA. 2023

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)	%
1	BM. Peralatan dan Mesin	697.248.800,00	692.979.000,00	4.269.800,00	99,39
2	BM. Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	0,00
3	BM Jalan, Jaringan dan Irigasi	0,00	0,00	0,00	0,00
4	BM Aset Tetap Lainnya	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00
5	BM Aset Lainnya	35.000.000,00	31.093.320,00	3.906.680,00	88,84
	JUMLAH	735.248.800,00	727.072.320,00	8.176.480,00	98,89

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran BKPSDM TA. 2023

2.2. Ikhtisar Realisasi Kinerja Keuangan per Program dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran BKPSDM Kota Palangka Raya sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan, pada Tahun Anggaran 2023 pada BKPSDM Kota Palangka Raya terdapat 3 (tiga) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota terdiri dari 7 (tujuh) Kegiatan dan 21 (dua puluh satu) Sub Kegiatan, Program Kepegawaian Daerah terdiri dari 4 (empat) Kegiatan dan 10 (sepuluh) Sub Kegiatan dan Program Pengembangan Sumber Daya Manusia terdiri dari 2 (dua) Kegiatan dan 4 (empat) Sub Kegiatan.

Berikut adalah kinerja realisasi keuangan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan per 31 Desember 2023 :

Tabel 2.4. Kinerja Realisasi Keuangan PPTK

No.	PPTK	Sub Keg	Pagu Anggaran	Realisasi	
				Rp	%
1	Sekretariat	21	7.082.031.349	6.613.304.357	93,38
2	Pengembangan Kompetensi Aparatur	4	1.931.674.540	1.775.514.617	91,91
3	Mutasi, Data dan SI Peg	5	717.260.599	669.788.253	93,38
4	PK2PA	5	1.977.571.612	1.860.825.773	94,09
	Jumlah	35	11.708.538.100	10.919.433.000	93,26

Sumber : data diolah (2024)

Tabel 2.5. Kinerja Realisasi Keuangan per Program

No.	Program	Pagu Anggaran	Realisasi	
			Rp	%
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	7.082.031.349	6.613.304.357	93,38
2	Program Kepegawaian Daerah	3.012.422.239	2.713.665.270	90,08
3	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	1.614.084.512	1.592.463.373	98,66
	Jumlah	11.708.538.100	10.919.433.000	93,26

Sumber : data diolah (2024)

Dari tabel di atas seluruh proses pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan pada pelaksanaan anggaran Tahun 2023 telah selesai 100 %, dengan pengertian proses tahapan kegiatan/aktivitas dalam sub kegiatan untuk menghasilkan output telah dilaksanakan seluruhnya.

BAB III

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan BKPSDM Kota Palangka Raya Tahun 2023 disusun dan disajikan dengan mempedomani Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 5 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah, dan dalam penyusunan laporan Keuangan menggunakan Sistem Informasi Pemerintah Daerah dari Kementerian Dalam Negeri atau dikenal dengan SIPD Kemendagri pada modul Akuntansi dan Pelaporan (AKLAP).

Basis Akuntansi yang digunakan dalam penyajian laporan Keuangan ini adalah :

1. basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dalam neraca, pengakuan pendapatan - LO dan beban dalam laporan operasional. Dalam hal peraturan perundangan mewajibkan disajikannya laporan keuangan dengan basis kas maka entitas Pemerintah Daerah wajib menyampaikan laporan demikian.
2. Basis akrual untuk neraca berarti bahwa aset, kewajiban dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah daerah, bukan pada saat kas diterima atau dibayar oleh kas daerah.
3. Basis akrual untuk LO berarti pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi, walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan, dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan. Pendapatan seperti bantuan pihak luar/asing dalam bentuk jasa disajikan pula di LO.
4. Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis kas maka LRA disusun berdasarkan basis kas berarti pendapatan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima oleh kas daerah atau entitas pelaporan, serta belanja dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari kas daerah. Pemerintah Daerah tidak menggunakan istilah laba, melainkan menggunakan sisa perhitungan anggaran (lebih/kurang) untuk setiap tahun anggaran. Sisa perhitungan anggaran tergantung pada selisih realisasi pendapatan dan pembiayaan penerimaan dengan belanja dan pembiayaan pengeluaran.

Adapun komponen Laporan Keuangan yang disajikan oleh BKPSDM Kota Palangka Raya TA. 2023 sebagai entitas akuntansi terdiri dari laporan pelaksanaan anggaran (*budgetary report*) dan laporan finansial, sehingga seluruh komponen menjadi sebagai berikut :

1. Laporan Realisasi Anggaran;
2. Neraca;
3. Laporan Operasional;

4. Laporan Perubahan Ekuitas;
5. Catatan atas Laporan Keuangan.

3.1 Rincian dan penjelasan masing-masing pos-pos pelaporan Keuangan

3.1.1. ASET

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/ atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh oleh pemerintah daerah, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber – sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Saldo Aset BKPSDM per 31 Desember 2023 sebesar Rp. 5.616.092.070,15 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.1. Rincian Aset BKPSDM per 31 Desember 2023

URAIAN	TAHUN 2023 (Rp)	TAHUN 2022 (Rp)	Kenaikan/Penurunan	
			Rp.	%
Aset Lancar	10.292.500,00	7.152.513,15	3.139.986,85	43,90
Aset Tetap	5.928.424.084,00	5.297.018.051,00	631.406.033,00	11,92
Aset Lainnya	357.430.826,00	311.921.506,00	45.509.320,00	14,58
Jumlah	6.296.147.410,00	5.616.092.070,15	680.055.339,85	12,10

Sumber : Neraca BKPSDM TA. 2023

Terdapat kenaikan Aset pada BKPSDM 12,10% pada Tahun 2023 bila dibandingkan dengan tahun 2022 yaitu sebesar Rp. 680.055.339,85 (*enam ratus delapan puluh juta lima puluh lima ribu tiga ratus tiga puluh Sembilan rupiah delapan puluh lima sen*) kenaikan tersebut terdapat pada Aset Lancar, Aset Tetap dan Aset Lainnya dan kenaikan terbesar pada Aset Lancar sebesar 43,90% atau Rp. 3.139.986,85 (*tiga juta seratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh enam rupiah delapan puluh lima sen*); meningkatnya nilai aset tersebut terdapat pada persediaan.

3.1.1.1. Aset Lancar

Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset lancar yang meliputi kas dan setara

kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan. Berikut adalah rincian Aset Lancar BKPSDM Kota Palangka Raya per 31 Desember 2023

Tabel 3.2. Rincian Aset Lancar BKPSDM per 31 Desember 2023

URAIAN	TAHUN 2023 (Rp)	TAHUN 2022 (Rp)	Kenaikan/Penurunan	
			Rp.	%
Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor	9.982.700,00	5.996.563,15	3.986.136,85	66,47
Natura dan Pakan	309.800,00	1.155.950,00	(846.150,00)	(73,19)
Jumlah	10.292.500,00	7.152.513,15	3.139.986,85	43,90

Sumber : Neraca BKPSDM TA. 2023

3.1.1.2. Aset Tetap

Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan Pemerintah Daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Tabel 3.3. Rincian Aset Tetap BKPSDM per 31 Desember 2023

URAIAN	TAHUN 2023 (Rp)	TAHUN 2022 (Rp)	Kenaikan/Penurunan	
			Rp.	%
Peralatan dan Mesin	5.164.511.729,00	4.456.803.529,00	707.708.200,00	15,87
Gedung dan Bangunan	4.105.874.653,00	4.229.874.653,00	(124.000.000,00)	(2,93)
Jalan, Jaringan dan Irigasi	10.000.000,00	36.140.000,00	(26.140.000,00)	(72,32)
Akumulasi Penyusutan	(3.351.962.298,00)	(3.425.800.131,00)	(73.837.833,00)	(2,15)
Jumlah	5.928.424.084,00	5.297.018.051,00	631.406.033,00	11,92

Sumber : Neraca BKPSDM TA. 2023

Terdapat kenaikan peralatan dan mesin pada Tahun 2023 sebesar 15,87% yang diperoleh dari pengadaan barang dan reklas dari persediaan ke aset tetap. Dan penurunan terdapat pada aset tetap Gedung dan Bangunan; dan jalan, jaringan dan irigasi karena adanya hibah Gedung parkir dan gedung tambahan serta jaringan instalasi listrik dan telepon dari Pemerintah Kota Palangka Raya kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah sesuai dengan Naskah

Perjanjian Hibah Daerah Nomor 900/099/Bid.IV/BPKAD/1/2022 Tentang Hibah Barang Milik Daerah Pemerintah Kota Palangka Raya Pada Sekretariat Daerah Kota Palangka Raya dan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia selaku pengguna barang

3.1.1.3. Aset Lainnya

Aset lainnya merupakan aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka Panjang, aset tetap dan dana cadangan

Tabel 3.3. Rincian Aset Lainnya BKPSDM per 31 Desember 2023

URAIAN	TAHUN 2023 (Rp)	TAHUN 2022 (Rp)	Kenaikan/Penurunan	
			Rp.	%
Aset Tidak Berwujud	944.552.220,00	839.458.900,00	105.093.320	12,51
Aset Lain-lain	3.380.000,00	62.964.000,00	(59.584.000,00)	(94,63)
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(590.501.394,00)	(590.501.394,00)	0,00	0,00
Jumlah	357.430.826,00	311.921.506,00	45.509.320	14,58

Sumber : Neraca BKPSDM TA. 2023

Pada Aset tak berwujud terdapat kenaikan dari Tahun 2022 yaitu sebesar 12,51% yang diperoleh dari pengadaan aset tidak berwujud berupa software, sedangkan aset lain-lain mengalami penurunan nilai karena penghapusan aset rusak berat/usang sesuai dengan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kota Palangka Raya Nomor 188.46/13/2023 tentang penghapusan barang milik daerah dari daftar barang pengguna barang pada perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya.

3.1.2. KEWAJIBAN

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah.

Tabel 3.4. Rincian Kewajiban BKPSDM per 31 Desember 2023

URAIAN	TAHUN 2023 (Rp)	TAHUN 2022 (Rp)	Kenaikan/Penurunan	
			Rp.	%
Kewajiban jangka Pendek	6.135.208,00	6.845.159,00	(709.951,00)	(10,37)
Jumlah	6.135.208,00	6.845.159,00	(709.951,00)	(10,37)

Sumber : Neraca BKPSDM TA. 2023

Kewajiban jangka pendek pada tahun 2023 merupakan utang belanja jasa kantor atas tagihan telepon dan listrik ub. Desember 2023 dengan total sebesar Rp. 6.135.208,00

3.1.3. EKUITAS

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah

Tabel 3.5. Rincian Ekuitas BKPSDM per 31 Desember 2023

URAIAN	TAHUN 2023 (Rp)	TAHUN 2022 (Rp)	Kenaikan/Penurunan	
			Rp.	%
Ekuitas	5.912.125.605,00	5.168.776.314,15	743.349.290,85	14,38
Jumlah	5.912.125.605,00	5.168.776.314,15	743.349.290,85	14,38

Sumber : Neraca BKPSDM TA. 2023

3.1.4. PENDAPATAN

Tahun Anggaran 2023 pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Palangka Raya tidak mempunyai anggaran dan realisasi pendapatan.

3.1.5. BEBAN

Beban adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih. Jumlah beban pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Palangka Raya Per 31 Desember 2023 sebesar Rp. 10.459.086.352,85 (*sepuluh milyar empat ratus lima puluh sembilan juta delapan puluh enam ribu tiga ratus lima puluh dua rupiah delapan puluh lima sen*) dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.6. Rincian Beban BKPSDM per 31 Desember 2023

URAIAN	TAHUN 2023 (Rp)	TAHUN 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	
			Rp.	%
Beban Pegawai	4.664.071.154,00	4.615.468.500,00	48.602.654,00	1,05
Beban Barang dan Jasa	5.438.710.388,15	5.454.976.765,85	(16.266.377,70)	(0,30)
Beban Hibah	76.302.167,00	0,00	76.302.167,00	100,00
Jumlah	10.179.083.709,15	10.070.445.265,85	108.638.443,30	1,08

Sumber : Laporan Operasional BKPSDM TA. 2023

Tahun 2023 terdapat nilai beban hibah senilai Rp. 76.302.167,00 yang berasal dari penyerahan atau hibah barang milik daerah dari Pemerintah Kota Palangka Raya kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah atas Aset yang berada di atas tanah milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah di Jalan Wahidin Sudirohusodo No. 20, berupa gedung parkir dan gedung tambahan, serta jaringan listrik dan jaringan telepon yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Barang Milik Daerah nomor 900/101/Bid.IV/BPKAD/I/2022.

3.1.5.1. Beban Pegawai

Beban Pegawai pada Tahun 2023 adalah senilai 4.664.071.154 dengan perincian pada tabel berikut :

Tabel 3.7. Rincian Beban Pegawai BKPSDM per 31 Desember 2023

Uraian	Saldo Tahun 2023 (Rp.)			Keterangan	
	LO	LRA	Perbedaan	Uraian	Jumlah
Beban Gaji Pokok ASN	2.059.854.210	2.059.854.210	0		
Beban Tunjangan Keluarga ASN	133.883.150	133.883.150	0		
Beban Tunjangan Jabatan ASN	144.530.000	144.530.000	0		
Beban Tunjangan Fungsional ASN	48.503.980	48.503.980	0		
Beban Tunjangan Fungsional Umum ASN	65.850.000	65.850.000	0		
Beban Tunjangan Beras ASN	101.677.680	101.677.680	0		
Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	2.558.982	2.558.982	0		
Beban Pembulatan Gaji ASN	35.150	35.150	0		
Beban Iuran Jaminan Kesehatan ASN	147.386.506	147.386.506	0		

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Uraian	Saldo Tahun 2023 (Rp.)			Keterangan	
	LO	LRA	Perbedaan	Uraian	Jumlah
Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	4.230.093	4.230.093	0		
Beban Iuran Jaminan Kematian ASN	12.690.303	12.690.303	0		
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	1.775.791.100	1.775.791.100	0		
Beban Honorarium	167.080.000	167.080.000	0		
JUMLAH BEBAN PEGAWAI	4.664.071.154	4.664.071.154	0		

Sumber : Laporan Operasional & Laporan Realisasi Anggaran BKPSDM TA. 2023

3.1.5.2. Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan Jasa pada Tahun 2023 adalah senilai 4.664.071.154 dengan perincian pada tabel berikut :

Tabel 3.8. Rincian Beban Barang dan Jasa BKPSDM per 31 Desember 2023

Uraian	Saldo Tahun 2023 (Rp.)			Keterangan	
	LO	LRA	Perbedaan	Uraian	Jumlah
Beban Barang Pakai Habis	586.458.626,15	586.458.626,15	0		
Beban Jasa Kantor	1.849.396.851	1.924.106.802	-74.709.951	Total Perbedaan	74.709.951
				Reklas Beban Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi ke Aset lainnya-Software	74.000.000
				Selisih beban tagihan listrik terhadap utang belanja tagihan listrik tahun 2022 dan 2023	720.601
				Selisih beban tagihan telepon terhadap utang	- 10.650

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Uraian	Saldo Tahun 2023 (Rp.)			Keterangan	
	LO	LRA	Perbedaan	Uraian	Jumlah
				belanja tagihan telepon tahun 2022 dan 2023	
Beban Iuran Jaminan/Asuransi	21.534.679	21.534.679	0		
Beban Sewa Peralatan dan Mesin	3.100.000	3.100.000	0		
Beban Sewa Aset Tetap Lainnya	6.150.000	6.150.000	0		
Beban Jasa Konsultansi Non Konstruksi	0	0	0		
Beban Beasiswa Pendidikan PNS	156.567.100	156.567.100	0		
Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	679.979.000	679.979.000	0		
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	145.800.463	145.800.463	0		
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	55.965.781	55.965.781	0		
Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	0	0	0		
Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.858.757.888	1.858.757.888	0		
Beban Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	75.000.000	75.000.000	0		
Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	0	0	0		
JUMLAH BEBAN BARANG & JASA	5.438.710.388	5.513.420.339	-74.709.951		

Sumber : Laporan Operasional & Laporan Realisasi Anggaran BKPSDM TA. 2023

3.1.1.1. Beban Hibah

Beban Hibah pada Tahun 2023 adalah senilai 4.664.071.154 dengan perincian pada tabel berikut :

Uraian	Saldo Tahun 2023 (Rp.)			Keterangan	
	LO	LRA	Perbedaan	Uraian	Jumlah
Beban Hibah Barang kepada Pemerintah Daerah Lainnya	76.302.167	76.302.167	0		
JUMLAH BEBAN HIBAH	76.302.167	76.302.167	0		

Sumber : Laporan Operasional & Laporan Realisasi Anggaran BKPSDM TA. 2023

BAB IV

PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

BKPSDM Kota Palangka Raya telah secara penuh melaksanakan pembayaran secara nontunai untuk belanja-belanja kegiatan sejak awal TA 2022; Dan Tahun 2023 merupakan tahun pertama bagi Pemerintah Kota Palangka Raya secara penuh menggunakan modul Akuntansi dan Pelaporan pada Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) Kemendagri untuk pelaksanaan seluruh proses jurnal hingga penyusunan laporan keuangan SKPD. Dan sebagian besar pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pada BKPSDM pada Tahun 2023 dilakukan melalui metode *e-purchasing* dengan menggunakan katalog lokal untuk mendukung kebijakan pemerintah mendorong pertumbuhan UMKM dan memberdayakan industri dalam negeri melalui peningkatan penggunaan produk dalam negeri.

BAB V

PENUTUP

Demikian Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) SKPD disusun sebagai salah satu bagian dari komponen laporan keuangan yang harus disajikan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Palangka Raya sebagai Entitas Akuntansi pada Pemerintah Kota Palangka Raya.

Selain sebagai bentuk akuntabilitas atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada BKPSDM Kota Palangka Raya dalam satu periode pelaporan; Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi para penggunanya terutama dalam menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi atas penggunaan sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Palangka Raya, 22 Mei 2024

Plt. KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KOTA PALANGKA RAYA



Dra. FIFI ARFINA, M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 19640704 198302 2 001